



JUMAT, 12 JUNI 2024

SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Pembangunan Offtake SPAM Diusulkan Masuk APBD-P

BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu akan merampungkan pembangunan offtake pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Bengkulu Tengah - Kota Bengkulu - Seluma (Benteng - Kobema) yang ditarget beroperasi akhir 2024 ini.

Usulan pembangunan offtake SPAM tersebut masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024 ini, yang diperkirakan anggarannya mencapai Rp1,5 - Rp3 miliar untuk per 1 offtake.

"Iya yang menjadi tanggungjawab kita, tahun ini selesai. Tinggal 1 offtake dan kita usulkan APBD-P akan selesai, kebutuhan Rp1,5 - Rp3 miliar per 1 offtake," sampai Kepala Dinas (Kadis) PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, ST, MSI, Kamis, 11 Juli 2024.

Seperti diketahui, total anggaran pembangunan PSN SPAM regional Benteng - Kobema ini menghabiskan sekitar Rp170 miliar.

Pemprov Bengkulu melalui Dinas PUPR difokuskan pada pembangunan sebagian Jaringan Distribusi Utama (JDU) hingga offtake, distribusi kapasitas air, penguatan kelembagaan pengelola SPAM Kobema.

Sedangkan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) VIII Bengkulu Rp600 miliar yang akan ambil bagian pada pembangunan unit air baku dan jaringan pipa transmisi.

Untuk Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Bengkulu sebesar Rp400 miliar dan akan fokus pada pembangunan IPA dengan kapasitas 400 liter/detik dan sebagian JDU sampai dengan offtake.

Sedangkan, untuk anggaran di 2 kabupaten dan 1 kota sendiri, yakni Kota Bengkulu tahun ini Rp35 miliar menyisakan Rp15 miliar.

Kabupaten Seluma tahun ini sudah dianggarkan Rp20 miliar masih menyisakan Rp30 miliar.

Bengkulu Tengah sudah dianggarkan Rp20 miliar dari total keseluruhan Rp40 miliar.

Sisa yang belum dilenggkapi oleh 2 kabupaten dan 1 kota tersebut, akan diajukan pada APBD 2025 mendatang.

"Iya ada pembagian tugas dan anggaran APBD maupun lainnya.

"Ini tentu akan diuji coba juga pada tahun ini, karena air ini siap minum nantinya," terang Isnan.

Isnan menerangkan, adapun sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan SPAM Benteng - Kobema akan melibatkan banyak unsur.

Seperti BBWS VIII yang akan mengambil bagian pada pembangunan unit air baku dan jaringan pipa transmisi.

Kemudian, BPPW Bengkulu yang akan ambil bagian pada pembangunan IPA dengan kapasitas 400 liter/detik dan sebagian JDU sampai dengan offtake.

Ada juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan ambil bagian pada pembangunan sebagian JDU hingga off-take, Distribusi Kapasitas Air, Penguatan Kelembagaan Pengelola SPAM Benteng-Kobema.

Terakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Benteng, Kota Bengkulu dan Seluma akan ambil bagian pada membangun pipa jaringan distribusi layanan masing-masing wilayah, Melayani SR sesuai target.

"Ada dari BBWS VII, BPPW, Pemprov dan 3 kabupaten yang terlibat, itu memiliki kewajiban masing-masing," terang Isnan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Faeshol Cahyo Nugroho menerangkan, bahwa sesuai dengan tugas dan peran bah-

wa pihaknya akan mengawasi target pembangunan PSN SPAM Benteng - Kobema.

"Sesuai tugas kami, untuk mengawasi target - target dai proyek seperti PSN SPAM ini," ungkap Faeshol.

Faeshol mengungkapkan, bahwa BPKP Provinsi Bengkulu agar PSN SPAM ini sesuai target, pihaknya telah memberikan atensi kepada pihak - pihak yang mengerjakan proyek tersebut.

"Kita sudah memberikan atensi kepada pihak yang terlibat untuk sesuai dengan target," ujar Faeshol.

Diberitakan sebelumnya, luas lahan di Kelurahan Pekan Sabtu yang akan digunakan membangun SPAM Kobema ini yaitu sekitar 1 hektare. Untuk lebar depan 50 meter dan panjang ke belakang 200 m².

Untuk memastikan pembangunan tersebut lancar, maka seluruh bangunan ilegal yang ada di lahan tersebut akan digusur atau ditertibkan.

Lahan reservoir tersebut, sebelumnya sudah dibeli oleh Pemprov pada 2013 lalu.

Bahkan dari hasil keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang pernah dilakukan oleh pemilik atau ahli waris lama, sudah membuktikan bahwa sertifikat yang dimiliki oleh Pemprov Bengkulu yang berlaku.

Dengan begitu, semua aktivitas yang memanfaatkan lahan tersebut, termasuk mendirikan bangunan merupakan hal yang ilegal. (afa)